



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Melalui : Kepala Seksi Rancang Bangun Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Dari : Analis Infastruktur Rancang Bangun
Tembusan : -
Tanggal : 9 Agustus 2022
Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Mengikuti Workshop Pengelolaan Data Sektoral secara Elektronik

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 094/2509 tanggal 8 Agustus 2022, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas dilaksanakan oleh Sri Sutrisni, ST, MT;
2. Dasar hukum penyelenggara Satu Data Nasional adalah Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Dasar hukum penyelenggara Satu Data Provinsi Jawa Tengah adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022.
4. PPID Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai Walidata Pendukung bertugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan prinsip SDI;
 - b. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Daftar Data;
 - c. Membina Produsen data.
5. Produsen Data Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah unit/bidang/seksi bertugas:
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data
 - c. Menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip SDI
 - d. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah

6. Timeline Pengelolaan Data sektora secara elektronik

NO	RANCANGAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENJELASAN LAIN	2022			
					AGS	SEP	OKT	NOV
1.	Sosialisasi PerGub No. 6 Tahun 2022	Seluruh Perangkat Daerah (PD) Prov. Jateng	PD memahami tugas dan tanggungjawab dalam SDJT	Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (SDJT)				
2.	Sosialisasi Portal Satu Data Jawa Tengah	Seluruh Perangkat Daerah (PD) Prov. Jateng	PD dapat mengakses (login, upload, download) Portal SDJT	<ul style="list-style-type: none"> • Alamat akses https://data.jatengprov.go.id • Setiap PD akan menerima User 				
3.	Asistensi Identifikasi Data Sektoral	Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi data pada E_Database	Daftar data sektoral msg2 PD yang akan diserahkan melalui Portal SDJT	Identifikasi data sektoral mengacu pada data pembangunan yang tertuang dalam E_Database				
4.	Asistensi Penyerahan Data Secara Elektronik	Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi data pada E_Database	Setiap PD memahami tata cara penyerahan data melalui Portal SDJT	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Petunjuk Teknis Penyerahan Data melalui Portal SDJT • Dilakukan secara bertahap 				
5.	Peningkatan Kapasitas Produsen dan Walidata Pendukung Daerah	1.Walidata Pendukung Daerah (1 org) 2.Perwakilan Produsen Data (1 org)	1.Walidata Pendukung Daerah memahami tata cara pemeriksaan data 2.Produsen data memahami tata cara pengumpulan data	Sesuai Peraturan yang berlaku, yaitu : 1. Peraturan BPS No. 4/2019 tentang NSPK Statistik Sektoral				

NO	RANCANGAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENJELASAN LAIN	2022		
					OKT	NOV	DES
				2. Peraturan BPS No. 4/2021 tentang Standar Data Statistik Nasional 3. Peraturan BPS No. 5/2021 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik 4. Perka BIG No. 13/2013 tentang NSPK Pemutakhiran IGD 5. Perka BIG No. 12/2013 6. KepKa BIG No. 30/2013 7. SE Ka BIG No. 6/2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial			
6	Koordinasi Implementasi SDI di tingkat Kabupaten/Kota	1. Koordinator SDJT 2. Walidata Daerah SDJT 3. Walidata Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	1. Identifikasi Permasalahan dalam Implementasi SDI di tingkat Kabupaten/Kota				

Demikian untuk menjadikan periksa, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Hormat Kami



Sri Sutrisn, ST MT

NIP. 19820531 201001 2 010

DOKUMENTASI

